

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS SOSIAL PEMERINTAHAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Data Pembuka Wawasan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah		Isu Gender		Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
KEGIATAN: Penguatan Kelembagaan PUG		Faktor Kesenjangan <u>Akses :</u>	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
TUJUAN: Mensinergikan peran kelembagaan PUG dan Anak agar mampu berperan dalam		<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman OPD tentang Pokja PUG dan Gender Focal Point - Belum adanya OPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman perencanaan tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran - Belum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pertemuan / koordinasi Kelompok Kerja PUG dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran - Belum 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksanaanya Rapat Pokja PUG, Focal Point dan Forum Diskusi PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Rapat Pokja PUG, Focal Point dan Forum Diskusi PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Rapat Pokja PUG, Focal Point dan Forum Diskusi PUG 	<ul style="list-style-type: none"> Output : Terlaksanaanya Rapat Pokja PUG, Focal Point dan Forum Diskusi PUG Outcome : Mensinergikan peran kelembagaan PUG dan Anak agar mampu berperan dalam

pembanguna n	<p>responsif gender</p> <p><u>Partisipasi :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Pertemuan / koordinasi Kelompok Kerja PUG dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender. <p><u>Manfaat :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan PUG dan Gender Focal Point belum mampu mendorong OPD dalam menyusun perencanaan dan penganggaran 	<p>adanya regulasi hukum didaerah sebagai dasar penyusuna n perencanaaa n dan penganggar an responsif gender;</p> <p>- Belum tersedianya data terpilih menurut jenis kelamin pada semua bidang pembangun an secara lengkap dan akurat;</p>	<p>- Tidak berfungsin ya Pokja PUG dan Gender Focal Point di masing – masing OPD;</p> <p>- Kurangnya kesadaran tentang pentingnya integrasi gender dalam perencana an dan pengangga ran pada setiap OPD;</p> <p>- Kurangnya koordinasi OPD Driver dalam pelaksanaa n kegiatan PUG dan</p>				dalam pembanguna n
-----------------	--	--	---	--	--	--	--------------------------

		responsif gender	- Terbatasnya anggaran untuk menjalankan fungsi Dinas SOSP3APPK B sebagai driver PUG.	Gender Focal Point;				
--	--	------------------	---	---------------------	--	--	--	--

KEPALA
DINSOSP3APPKB

BOBBY P. RIZA, S.STP.M.Si
NIP 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Drs. ANDY SUMANTO, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si. NIP 19820521 200012 1 002

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN ANGGARAN : 2018

PROGRAM	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
KODE PROGRAM	2.02.1.06.01.19
KEGIATAN	Penguatan Kelembagaan PUG
HASIL/OUTPUT	Terlaksananya Rapat Pokja PUG, Focal Point dan Forum Diskusi PUG
TUJUAN	Mensinergikan Peran Kelembagaan PUG dan Anak agar mampu bersaing dalam pembangunan
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan</p> <p>RPJMN Indonesia menetapkan adanya 3 (tiga) strategi pembangunan nasional, salah satunya adalah Pengarusutamaan Gender (PUG). Dengan PUG maka kebijakan /program / kegiatan setiap OPD harus mengintegrasikan gender sesuai tugas dan fungsi masing – masing OPD.</p> <p>Sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, Bapppeda ditetapkan sebagai ketua Pokja PUG dan lembaga yang membidangi pemberdayaan Perempuan ditetapkan sebagai sekretariat. Pada Permendagri tersebut ditegaskan setiap daerah harus membentuk kelembagaan PUG sebagai wadah konsultasi pelaksanaan PUG dan membentuk Gender Focal Point yang menjalankan fungsi sebagai fasilitator, inisiator maupun advokator dalam implementasi PUG.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none">• Masih kurangnya pemahaman OPD tentang Pokja PUG dan Gender Focal Point• Belum adanya OPD yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurangnya pemahaman perencana tentang penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;• Belum adanya regulasi hukum daerah sebagai dasar penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender;• Belum tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada semua bidang pembangunan secara lengkap dan akurat;• Terbatasnya anggaran untuk menjalankan fungsi Dinas SOSP3APPKB sebagai driver PUG. <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none">• Kurangnya Pertemuan / koordinasi Kelompok Kerja PUG dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender;• Tidak berfungsinya Pokja PUG dan Gender Focal Point di masing – masing OPD;• Kurangnya kesadaran tentang pentingnya integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran pada setiap OPD;• Kurangnya koordinasi OPD Driver dalam pelaksanaan kegiatan PUG dan Gender Focal Point;

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 16.570.000,-
RENCANA AKSI	Penyelenggaraan Penguatan Kelembagaan PUG
	Tujuan : Mensinergikan Peran Kelembagaan PUG dan Anak agar mampu berperan dalam pembangunan
	Keluaran : Terlaksananya Rapt Pokja PUG, Focal Point dan Forum Diskusi PUG

KEPALA
DINSOSP3APPKB

BOBBY P. RIZA, S.STP.M.Si
NIP 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bapppeda Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB Bobby P. Riza, S.STP., M.Si. NIP 19820521 200012 1 002
---	--	---	---